

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Observasi

BAB IV ini membahas hasil observasi yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat mengenai pengelolaan aset daerah dan efisiensi keuangan daerah. Pembahasan dilakukan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca daerah, serta data pemanfaatan aset daerah tahun 2023 dan 2024. Selain itu, pada bab ini juga dibahas hubungan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan fungsi penunjaing urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD berperan dalam pengelolaan anggaran daerah, pengelolaan barang milik daerah, penyusunan laporan keuangan daerah, serta pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKAD Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu aspek penting karena aset daerah merupakan sumber daya yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Hasil dan Pembahasan ini menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2023 dan 2024
2. Neraca tahun 2023 dan 2024
3. Data Pemanfaatan Aset Daerah (Pinjam pakai dan Sewai).

Data tersebut digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan daerah di Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, data yang digunakan dalam pembahasan ini juga telah melalui proses verifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan analisis pada tugas akhir ini. Data laporan keuangan yang diperoleh mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan data dua periode tahun anggaran, yaitu 2023 dan 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pengelolaan aset daerah serta dampaknya terhadap efisiensi keuangan daerah dari waktu ke waktu.

4.2 Hasil Observasi Aset Daerah

Aset daerah merupakan seluruh barang milik daerah yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada

masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah perlu dilakukan secara optimal agar aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat secara ekonomi maupun administratif bagi pemerintah daerah. Pada sub bab ini akan dibahas mengenai kondisi aset daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data neraca tahun 2023 dan 2024 serta bentuk pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKAID Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil observasi aset daerah yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan jumlah aset daerah pada tahun 2024. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan pengelolaan seperti perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah.

4.2.1 Total Aset Daerah

Total aset daerah merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Data total aset daerah diperoleh dari laporan neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dan 2024.

Tabel 4. 1 Total Aset Daerah

Tahun	Total Aset (Rp)
2023	12.191.738.756.207,30
2024	12.360.751.333.086,70

Sumber Data : Neraca Tahun 2023 dan 2024 BPKAD Provinsi Sumbar.

Dairi analisis tabel 4.1 diatas terjadi kenaikan Total Aset Daerah sebesar = 169.012.576.879,40.

Kenaikan total aset daerah tersebut menunjukkan adanya penambahan aset yang dimiliki pemerintah daerah pada tahun 2024. Peningkatan aset dapat berasal dari pengadaan aset baru, pembangunan infrastruktur daerah, serta penambahan aset tetap lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan.

4.2.2 Aset Tetap Daerah

Aset tetap daerah merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Aset tetap terdiri dari beberapa jenis seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Tabel 4. 2 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Tanah	2.309.015.698.531,82	2.317.257.971.575,32
Peralatan & Mesin	2.905.254.397.064,63	3.100.523.394.031,89
Gedung , Bangunan	4.627.403.775.024,23	4.876.017.515.758,74
Jalan, Jaringan	6.886.411.506.934,38	7.128.701.627.636,34
Aset Tetap Laiinnya	429.240.113.127,75	472.833.248.677,75
Total Aset	17.157.325.490.682,81	17.895.333.757.680,04

Sumber Data : Neraca Tahun 2023 dan 2024 BPKAD Provinsi Sumbar.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hampir seluruh jenis aset tetap mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Peningkatan terbesar terdapat pada aset jalan dan jaringan serta gedung dan bangunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelayanan publik.

Selain itu, peningkatan aset tetap juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun demikian, peningkatan aset tetap juga harus diimbangi dengan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang baik agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan beban anggaran yang berlebihan di masa mendatang.

Dari analisis aset yang ada pada tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Aset mengalami peningkatan setiap tahun
2. Aset terbesar berada pada Jalan & Jaringan serta Gedung & Bangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah berada pada Infrastruktur, sehingga pengelolaan aset terus berkembang. Peningkatan aset daerah yang terjadi setiap tahun menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan investasi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Namun demikian, peningkatan aset tersebut juga harus diimbangi dengan pengelolaan yang optimal agar aset yang dimiliki tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetap juga mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi

pengelolaan aset yang lebih terarah agar dapat mendukung peningkatan efisiensi keuangan daerah.

4.3 Hasil Observasi Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil observasi efisiensi keuangan daerah, diketahui bahwa tingkat efisiensi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih berada pada kategori belum efisien karena realisasi belanja daerah masih lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah.

4.3.1 Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Data realisasi pendapatan dan belanja digunakan untuk melihat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dan 2024. Data tersebut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung tingkat efisiensi keuangan daerah. Melalui data pendapatan dan belanja tersebut dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efisien.

Berdasarkan data dari LRA, diperoleh angka sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Realisasi Pendapatan Daerah	6.263.878.436.851,68	6.482.418.683.405,20
Realisasi Belanja Daerah	6.352.991.353.499,87	6.524.664.745.123,96
Surplus/(Defisit)	(89.112.916.648,19)	(42.246.061.718,76)

Penerimaan Daerah	Pembiayaan	289.560.461.073,38	179.981.015.714,19
Pengeluaran Daerah	Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Sisai Anggrain (SiLPA)	Lebih Pembiayaan	180.447.544.425,19	117.734.953.995,43

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 & 2024 BPKAID

Sumbar.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dan 2024, diketahui bahwa pada kedua tahun tersebut pemerintah daerah mengalami kondisi defisit anggaran, yaitu keadaan dimana realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. Namun demikian, defisit tersebut masih dapat ditutupi melalui pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan, sehingga kondisi keuangan daerah tetap dapat dikendalikan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami defisit anggaran sebesar Rp89.112.916.648,19. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah memperoleh penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp180.447.544.425,19 yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.

Berdasarkan data tersebut, pembiayaan netto tahun 2023 dihitung sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Daerah = Rp180.447.544.425,19

Pengeluaran Pembiayaan Daerah = Rp20.000.000.000,00

Pembiayaan Netto = Rp160.447.544.425,19

Jumlah pembiayaan netto tersebut lebih besar dibandingkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar Rp89.112.916.648,19, sehingga seluruh defisit dapat ditutupi dengan baik. Setelah defisit ditutupi, masih terdapat sisa pembiayaan yang menjadi SILPA akhir tahun sebesar Rp180.447.544.425,19 dan dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mengalami defisit anggaran sebesar Rp42.246.061.718,76. Defisit tersebut juga disebabkan karena realisasi belanja daerah masih lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah kembali menggunakan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp179.981.015.714,19.

Pada tahun 2024 juga terdapat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal daerah. Dengan demikian, pembiayaan netto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Daerah = Rp179.981.015.714,19.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah = Rp20.000.000.000,00

Pembiayaan Netto = Rp159.981.015.714,19.

Jumlah pembiayaan netto tersebut lebih besar dibandingkan nilai defisit anggaran tahun 2024, sehingga defisit anggaran dapat ditutupi seluruhnya dan posisi SILPA akhir tahun menjadi Rp117.734.953.995,43.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami defisit anggaran pada tahun 2023 dan 2024, namun pemerintah daerah masih mampu menjaga stabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang baik. Pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya mampu digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran aktbat belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatan daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah telah berjalan cukup baik karena pemerintah daerah masih memiliki cadangan anggaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan efisiensi belanja daerah dan mengoptimalkan pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap penggunaan SILPA sebagai sumber pembiayaan dapat dikurangi pada tahun-tahun berikutnya.

Persentase pada tabel diatas menunjukain tingkat peningkatan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dari tahun 2023 ke tahun 2024. Realisasi pendapatain daerah mengalami peningkatan sebesar 3,49%, sedangkan realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 2,70%.

4.3.2 Hasil Observasi Perhitungan Efisiensi

Tabel 4. 4 Hasil Rasio Efisiensi Keuangan.

Tahun	Rasio Efisiensi	Keterangan
2023	101,42%	Tidak Efisien
2024	100,65%	Tidak Efisien

Sumber : Hasil perhitungan efisiensi keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, tingkat efisiensi keuangan daerah pada tahun 2023 sebesar 101,42% dan pada tahun 2024 sebesar 100,65%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah sehingga kondisi keuangan daerah masih tergolong tidak efisien.

Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan rasio efisiensi dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah walaupun belum mencapai kondisi efisien.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pendapatan daerah, namun belum mampu menyeimbangi peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian terhadap belanja daerah masih perlu ditingkatkan agar tercapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, efisiensi keuangan juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya optimal dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat guna.

4.4 Hasil Observasi Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah di BPKAID Provinsi Sumatera Barat dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku. Pengelolaan aset tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset daerah. Seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan aset daerah dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi antara BPKAD dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Pengelolaan aset yang baik sangat penting karena aset daerah merupakan salah satu sumber daya yang mendukung pelayanan publik dan kegiatan operasional pemerintahan daerah.

Pengelolaan aset daerah yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan pendapatan daerah, serta pengurangan pengeluaran yang tidak diperlukan.

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis aset, meningkatkan manfaat aset, serta meminimalkan terjadinya pemborosan anggaran daerah. Dengan pengelolaan yang optimal, aset daerah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

4.4.1 Perencanaan Aset

Perencanaan aset di BPKAID Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah yang disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Perencanaan dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan aset agar kebutuhan barang dapat diketahui secara jelas dan terarah.

Dalam proses perencanaan, BPKAD mempertimbangkan kondisi aset yang telah dimiliki, tingkat kebutuhan operasional, serta kemampuan keuangan daerah. Perencanaan aset dilakukan setiap periode anggaran untuk memastikan bahwa pengadaan barang dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Perencanaan aset yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan anggaran sehingga pengeluaran daerah dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu, perencanaan yang tepat juga dapat menghindari terjadinya pengadaan aset yang tidak diperlukan.

4.4.2 Pengadaan Aset

Pengadaan aset di BPKAD Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan serta menunjang pelayanan publik. Pengadaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara transparan serta akuntabel.

Proses pengadaan aset dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan barang yang telah disusun sebelumnya. Pengadaan tersebut meliputi berbagai jenis aset seperti tanah, gedung, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, serta aset lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pengadaan aset yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung efektivitas kerja pemerintah

daerah. Selain itu, pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan juga dapat meminimalkan pemborosan anggaran daerah.

4.4.3 Penggunaan Aset

Penggunaan aset daerah di BPKAID Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah yang dimiliki digunakan sesuai dengan fungsi dan status penggunaannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aset-aset tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan, seperti penggunaan gedung kantor, kendaraan dinas, tanah, serta berbagai peralatan kerja lainnya. Penggunaan aset yang tepat akan membantu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja pemerintah daerah.

Selain itu, penggunaan aset juga dilakukan dengan memperhatikan pencatatan administrasi agar seluruh aset yang dimiliki dapat terdata dengan baik. Penggunaan aset yang optimal dapat membantu pemerintah daerah dalam menjaga kondisi aset dan memaksimalkan manfaat aset yang dimiliki.

4.4.4 Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan aset daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui berbagai bentuk pemanfaatan seperti pinjam pakai dan sewa barang milik daerah. Pemanfaatan aset dilakukan terhadap aset yang belum digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional pemerintahan agar tetap memberikan manfaat ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh, pemanfaatan aset melalui pinjam pakai dilakukan terhadap instansi pemerintah seperti :

1. Dinas Kesehatan
2. Badan Kepegawain Daerah
3. Dinas Perindag
4. Dinas Sosial
5. Kepolisian (Polda Sumbar)
6. Basarnas

7. Kejaksaan Tinggi Sumbar

8. Pemerintah daerah lain

Aset yang dipinjam pakaikan meliputi :

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan Dinas
4. Peralatan dan Mesin

Selain pinjam pakai, pemanfaatan aset juga dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah yang. Objek sewa nya meliputi Tanah dan Bangunan yang digunakan untuk lokasi AITM, kaintor cabang bank, gedung promosi, hotel pavilion dan fasilitas lainnya.

4.4.5 Pemeliharaan Aset

Pemeliharaan aset di BPKAID Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk menjaga kondisi aset agar tetap dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Pemeliharaan dilakukan secara rutin maupun berkala terhadap

berbagai aset daerah seperti gedung kantor, kendaraan dinas, serta peralatan lainnya.

Pemeliharaan aset dilakukan agar umur manfaat aset dapat bertahan lebih lama dan mengurangi risiko kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan operasional pemerintahan. Selain itu, pemeliharaan aset juga bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis aset daerah.

Pelaksanaan pemeliharaan yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karena itu, kegiatan pemeliharaan menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset daerah.

4.4.6 Penghapusan Aset

Penghapusan aset di BPKAD Provinsi Sumatera Barat dilakukan terhadap aset yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis, mengalami kerusakan berat, atau tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Penghapusan aset dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah. Penghapusan dapat dilakukan melalui penjualan, hibah, atau pemusnahan sesuai dengan kondisi aset yang dimiliki.

Pelaksanaan penghapusan aset bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi aset daerah serta memastikan bahwa data aset yang tercatat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya penghapusan aset, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan meminimalkan penumpukan aset yang sudah tidak produktif lagi.

4.5 Hasil Observasi Hubungan Pengaruh Kebijakan Pengolaan Aset Terhadap Efisiensi Keuangan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat, pengelolaan aset daerah memiliki hubungan yang cukup erat terhadap efisiensi keuangan daerah. Pengelolaan aset yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Perencanaan aset yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat telah membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan barang milik daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Perencanaan yang baik dapat membantu mengurangi terjadinya pengadaan barang yang tidak diperlukan sehingga penggunaan anggaran dapat lebih terkendali.

Selain itu, pengadaan aset yang dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan juga membantu pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan. Pengadaan yang dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Penggunaan aset daerah yang dilakukan secara optimal juga memberikan dampak terhadap efisiensi keuangan daerah. Aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan

publik dan operasional pemerintahan sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Pada aspek pemanfaatan aset, BPKAD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai bentuk pemanfaatan aset seperti pinjam pakai dan sewa barang milik daerah. Pemanfaatan aset melalui sewa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah tanpa harus melakukan pengadaan aset baru. Selain itu, pemanfaatan aset melalui pinjam pakai juga memberikan manfaat sosial bagi instansi pemerintah lainnya dalam mendukung pelayanan kepada Masyarakat.

Pemeliharaan aset yang dilakukan secara rutin juga berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah karena dapat menjaga kondisi aset agar tetap dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, pemerintah daerah dapat mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar di masa mendatang.

Sementara itu, penghapusan aset dilakukan terhadap aset yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis atau tidak dapat digunakan lagi. Penghapusan aset membantu pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban administrasi aset serta mengurangi penumpukan aset yang tidak produktif.

Meskipun pengelolaan aset daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan cukup baik, namun berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah diketahui bahwa tingkat efisiensi keuangan masih berada pada kategori tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi tahun 2023 sebesar 101,42% dan tahun 2024 sebesar 100,65%, yang menunjukkan bahwa

realisasi belanja daerah masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah.

Namun demikian, terjadi penurunan rasio efisiensi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah meskipun belum mencapai kondisi efisien secara optimal.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengelolaan aset daerah memiliki peranan penting dalam mendukung efisiensi keuangan daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Pengelolaan aset yang dilakukan secara baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan daerah.

Perencanaan aset yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan barang secara lebih tepat. Dengan adanya perencanaan yang baik, pengadaan aset dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan prioritas sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih terarah dan efisien.

Pengadaan aset yang dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan juga memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional pemerintahan. Aset yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas kerja pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan

pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan jugai membantu menciptakan pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Pada aspek penggunaan aset, pemerintah daerah telah memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan. Penggunaan aset yang optimal dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja dan memperlancar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Selainjutnya, pemanfaatan aset melalui mekanisme sewa dan pinjam pakai menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk mengoptimalkan aset yang belum digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional pemerintahan. Pemanfaatan aset melalui sewa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sedangkan pinjam pakai memberikan manfaat sosial bagi instansi pemerintah lainnya.

Selain itu, pemeliharaan aset yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kondisi aset agar tetap dapat digunakan sesuai fungsinya. Pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang umur manfaat aset serta mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Penghapusan aset juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset daerah karena membantu pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban administrasi barang milik daerah. Penghapusan dilakukan terhadap aset yang sudah tidak produktif agar data aset yang dimiliki tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Meskipun pengelolaan aset daerah telah dilakukan dengan cukup baik, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah masih

berada pada kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja daerah masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan efisiensi keuangan daerah secara optimal. Masih diperlukan peningkatan dalam pengendalian belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Selain itu, penggunaan sistem informasi pengelolaan aset yang lebih terintegrasi juga diperlukan agar pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat. Dengan pengelolaan aset yang lebih optimal, diharapkan aset daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan efisiensi keuangan daerah di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah memiliki pengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Pengelolaan aset yang dilakukan secara baik dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.